

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Perkembangan Sistem Politik Masa Reformasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Umum Orde Baru ke Reformasi Tahun 1997-2009)”. Kesimpulan ini merujuk pada pertanyaan rumusan masalah yang terdapat pada bab satu. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, merupakan pemilihan umum yang baru dapat dilaksanakan setelah sepuluh tahun Indonesia merdeka. Diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan sukses, namun sayangnya menjadi pemilihan umum pertama dan terakhir pada masa itu. Kesuksesan pemilihan umum ini kemudian sering dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 1999.

*Kedua*, pemilihan umum pada masa Orde Baru yang dilaksanakan enam kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) tidak terdapat perbedaan besar jika dilihat dari sistem, penyelenggaraan, hingga hasilnya. Bahkan asas yang menjadi dasar pemilihan umum tersebut tetap sama, yaitu *luber* (langsung, umum, bebas dan rahasia). Sistem pemilihan umum yang digunakan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum Orde Baru ini adalah sistem proporsional daftar tertutup. Untuk peserta pemilihan umum, hanya pada pemilihan umum tahun 1971 yang berbeda jumlahnya, lima pemilihan umum lainnya hanya memiliki tiga peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses penyelenggaraan pemilihan umum masa Orde Baru tidak mengalami perubahan yang signifikan.

*Ketiga*, pemilihan umum pada masa Reformasi yang dilaksanakan mulai tahun 1999 hingga tahun 2009. Walaupun pada masa Reformasi hanya tiga pemilihan umum yang dibahas yaitu pemilihan umum tahun 1999, 2004 dan 2009, tetapi perubahan yang terjadi sangat besar. Perubahan bahkan terjadi dalam tiap-tiap kali pemilihan umum dilaksanakan, jadi perubahan tidak hanya terjadi ketika rezim Orde Baru runtuh. Perubahan tersebut terjadi pada bagian sangat penting

dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu pada sistemnya, dari sistem proporsional daftar tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka.

*Keempat*, perubahan sistem pemilihan umum masa Orde Baru ke masa Reformasi. Perubahan dalam sistem pemilihan umum ini terjadi karena disebabkan oleh ketidaksukaan masyarakat akan sikap otoriter rezim Orde Baru dan keinginan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis dengan berusaha mewujudkan pemilihan umum yang lebih baik sesuai prinsip demokrasi yang diperkuat dengan adanya UUD 1945 Amandemen III dan IV. Kemudian untuk perbandingan kedua sistem pemilihan, peneliti melihat pada kelebihan dan kelemahan dari sistem proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka karena tidak ada sistem pemilihan yang sempurna. Pada tiap sistem tersebut pasti terdapat kelebihan dan kelemahan yang menguntungkan dan merugikan berbagai pihak yang terlibat seperti pemerintah, lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan masyarakat. Kelebihan sistem proporsional daftar tertutup misalnya pada sederhananya pelaksanaan pemilihan umum sehingga biaya, tenaga dan waktu menjadi lebih hemat. Untuk kelemahannya, dengan menggunakan sistem ini pemilihan umum menjadi kurang demokratis. Sedangkan kelebihan sistem proporsional daftar terbuka adalah dapat memilih pemimpin secara langsung sesuai yang pemilih inginkan sehingga pelaksanaan pemilihan umum menjadi lebih demokratis. Kemudian kelemahannya ialah dibutuhkannya biaya, tenaga dan waktu yang lama untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

## 5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber penunjang dalam mata pelajaran sejarah di SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sederajat, serta memperkaya sumber pembelajaran di sekolah bagi pengembangan materi mata pelajaran sejarah, khususnya mengenai sejarah pemilihan umum di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai sejarah pemilihan umum di Indonesia untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi kemajuan

pendidikan Indonesia dan dapat dijadikan sebagai kerangka berfikir untuk penelitian selanjutnya.